



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

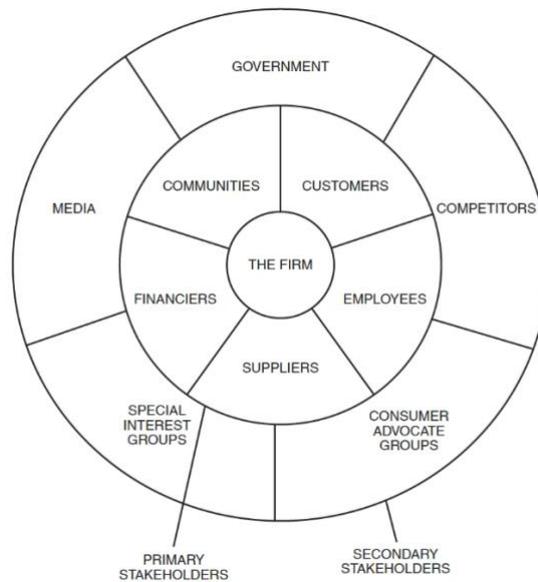
Pada Bab II, penulis akan membahas landasan teoritis yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Hal ini meliputi kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisis pengaruh stakeholder terhadap luas pengungkapan laporan keberlanjutan. Selain itu, penulis juga akan mengulas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini untuk memperkuat argument dan menemukan celah pengetahuan yang masih perlu diisi. Melalui penelitian – penelitian terdahulu penulis akan memaparkan pemahaman yang ada sebelumnya terkait dengan hubungan antara stakeholder dan luas pengungkapan laporan keberlanjutan. Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis kemudian merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Hipotesis ini akan digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, bab ini akan memberikan landasan yang kuat dan terperinci bagi penelitian yang akan dilakukan.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Stakeholder

Freeman & David, (1983) mengemukakan pertama kali mengenai *stakeholder theory*. Ia mengatakan bahwa *stakeholder* adalah individu atau kelompok yang terpengaruh oleh dan memiliki pengaruh terhadap proses perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada buku “*Theory of Stakeholder*” Freeman et al. (2010) digambarkan juga bahwa *stakeholder* yang terlibat dibagi menjadi 2, yaitu *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*. Pihak yang termasuk ke dalam *primary stakeholders* adalah pelanggan, karyawan, pemasok, pemegang saham, dan komunitas. Kelompok ini memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan yang menjadikan dampak mereka terhadap organisasi sangat besar. Di sisi lain, pihak yang termasuk ke dalam *secondary stakeholders* adalah pemerintah, media, kompetitor, aliansi konsumen, dan kelompok kepentingan khusus. Kelompok ini memiliki kepentingan terhadap

organisasi, meskipun tingkat kekuatan mereka tidak sebesar *primary stakeholders*. Pada gambar berikut akan terlihat ilustrasi konsep *primary* dan *secondary stakeholders*.



Gambar 2.1

Stakeholder Theory

Sumber: *Stakeholder Theory : The State of The Art* (2010, p. 24)

Menurut Donaldson & Preston (1995), teori stakeholder adalah teori yang mengemukakan bahwa perusahaan memiliki berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang sah dalam aktivitas perusahaan. Terdapat 3 aspek yang saling mendukung dan memberikan dasar bagi teori stakeholder yaitu:

- a. Aspek deskriptif : aspek yang berfokus dalam menggambarkan hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya.
- b. Aspek Instrumental : aspek ini menghubungkan manajemen pemangku kepentingan dengan kinerja perusahaan.
- c. Aspek normatif : aspek ini melibatkan prinsip moral atau filosofis yang mendasari operasi dan manajemen perusahaan. Aspek ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan secara intrinsik, bukan hanya fokus pada kepentingan pemegang saham.



Maka dapat dikatakan bahwa teori stakeholder ini dapat membantu perusahaan dalam luas pengungkapan laporan keberlanjutan dengan memetakan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas dan keberlanjutan perusahaan. Luas pengungkapan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan teori stakeholder dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap berbagai pihak yang terlibat. Ini membantu membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata stakeholder.

2. Teori Legitimasi

Menurut Suchman (1995) definisi teori legitimasi atau *Theory of Legitimate*:

“Theory of Legitimate is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.”

Hal ini dapat diartikan bahwa teori legitimasi adalah sebuah persepsi umum bahwa perilaku suatu entitas dianggap diinginkan, sesuai, atau tepat dalam suatu sistem sosial berdasarkan norma, nilai, keyakinan, dan definisi tertentu. Dengan kata lain, teori legitimasi mencerminkan pandangan masyarakat yang berlaku terhadap kelangsungan atau keberlanjutan perilaku suatu entitas dalam kerangka nilai dan norma universal.

Menurut Suchman (1995) terdapat 3 jenis legitimasi, yaitu:

- a. *Pragmatic Legitimacy* adalah suatu bentuk instrumental dari legitimasi dimana suatu organisasi mengambil Tindakan untuk mempertahankan dukungan dan menghindari kontroversi atau kritik yang dapat merusak citra di mata pemangku kepentingan. Konsep ini menyoroti pentingnya *responsive* terhadap harapan masyarakat dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dalam norma – norma dan nilai – nilai sosial.
- b. *Moral Legitimacy* bersifat penting dikarenakan masyarakat sering menilai organisasi tidak hanya berdasarkan keberhasilan operasional secara finansial,



namun juga sejauh mana mereka berperilaku sesuai dengan standar moral yang diyakini benar oleh masyarakat.

- c. *Cognitive Legitimacy* mengacu pada bagaimana suatu organisasi membangun dan mempertahankan persepsi di antara para pemangku kepentingan bahwa keberadaan dan aktivitasnya konsisten dengan norma dan kepercayaan yang diterima secara umum di masyarakat.

Menurut Dowling & Pfeffer (1975), teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi, batasan – batasan yang ditekankan oleh norma – norma dan nilai – nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

3. Laporan Keberlanjutan

- a. Pengertian Laporan Keberlanjutan

Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI) definisi dari laporan keberlanjutan atau *sustainability report*:

“*Sustainability reporting is defined as a process that assists companies in setting goals, measuring performance and managing change towards a sustainable global economy – one that combines long term profitability with social responsibility and environmental care. Sustainability reporting is the key platform for communicating the company’s economic, environmental, social and governance performance, reflecting positive and negative impacts.*”

Hal ini mengartikan bahwa laporan keberlanjutan didefinisikan sebagai suatu proses yang membantu perusahaan dalam menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan menuju ekonomi global yang berkelanjutan yang menggabungkan profitabilitas jangka Panjang dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan. Laporan keberlanjutan merupakan suatu platform kunci untuk berkomunikasi mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata Kelola perusahaan, mencerminkan dampak positif dan negative yang dihasilkan.

- b. Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan



Terdapat beberapa standard yang tersedia untuk membuat laporan keberlanjutan:

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) *Global Reporting Initiative (GRI) Standard*

GRI (*Global Reporting Initiative*) adalah organisasi internasional independen yang membantu perusahaan dan organisasi lain untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya, dengan menyediakan Bahasa global yang sama untuk mengkomunikasikan dampak tersebut. Standar ini adalah pelopor dan paling banyak digunakan oleh perusahaan di dunia. GRI merupakan system modular yang terdiri dari tiga standar, yaitu: *GRI Universal Standards*, *The GRI Sector Standards*, dan *The GRI Topic Standards*.

GRI Universal Standards mendukung perusahaan dalam mengidentifikasi topik-topik materialnya dengan menjabarkan prinsip-prinsip penting saat menyiapkan laporan. Standar ini juga berisi pengungkapan tentang konteks spesifik organisasi, seperti ukuran, kegiatan, tata Kelola, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

The GRI Sector Standards dapat diterapkan oleh organisasi pelopor, mendukung perusahaan dalam sektor – sektor untuk menentukan topik – topik material dan apa yang harus dilaporkan untuk setiap topik. Sebagai contoh, perusahaan minyak yang melaporkan sesuai dengan standar GRI diharuskan untuk menggunakan standar GRI 11: Sektor Minyak dan Gas .

The GRI Topic Standards memiliki 33 standar topik yang berfungsi sebagai panduan bagi perusahaan untuk mengungkapkan cara perusahaan tersebut memengaruhi suatu isu tertentu dan bagaimana cara mengelola dampak yang timbul dari isu tersebut. Sebagai contoh, perusahaan dapat merujuk pada Standar GRI terkait air dan limbah untuk melaporkan

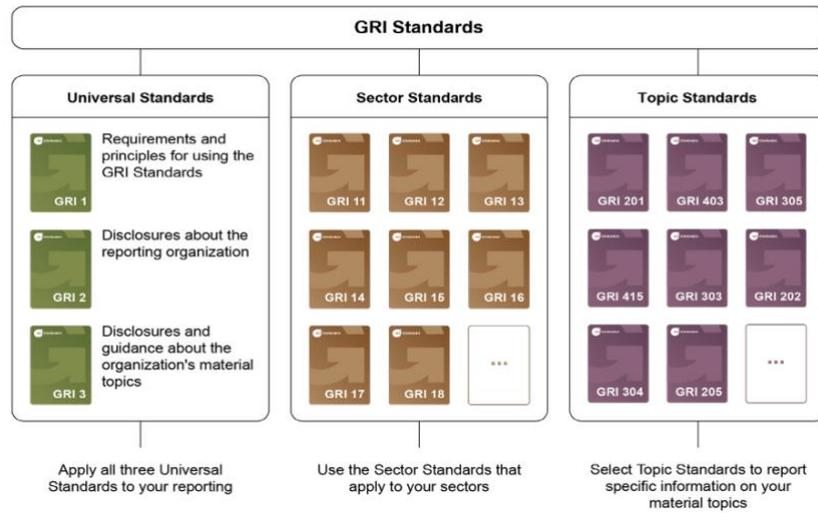
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dampaknya terhadap lingkungan karena pengambilan air dari wilayah yang mengalami krisis air dan bagaimana perusahaan mengelola dampak tersebut.



Gambar 2.2
GRI Standards

(2) *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*

Sustainability Accounting Standards Board adalah sebuah organisasi yang berperan penting dalam mengembangkan dan mempromosikan standar akuntansi berkelanjutan. Sasaran utama SASB adalah memberikan panduan yang terukur bagi perusahaan untuk melaporkan kinerja mereka dalam hal faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang relevan dengan industrinya.

Standar laporan keberlanjutan yang ditetapkan oleh SASB juga memiliki implikasi global, membantu perusahaan di seluruh dunia untuk mengadopsi praktik-praktik keberlanjutan yang konsisten. Dengan integrasi informasi berkelanjutan ke dalam laporan keuangan, perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang nilai mereka dan bagaimana mereka mengelola isu - isu berkelanjutan. Dalam era di mana pemangku kepentingan semakin menuntut transparansi dan tanggung jawab sosial, standar SASB telah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi panduan yang berharga bagi perusahaan dalam memenuhi tuntutan ini dan mencapai tujuan berkelanjutan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(3) ISO 26000

ISO 26000 adalah dokumen panduan internasional mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR). ISO 26000 memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip dan aspek pokok yang perlu dikelola oleh organisasi, dengan tujuan membantu organisasi mengenali dan mengendalikan risiko serta dampak yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial mereka. Adanya laporan keberlanjutan yang menggunakan standar ISO 26000 dapat membuktikan bahwa komitmen kebijakan organisasi untuk menghilangkan keraguan pemangku kepentingan. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk kepercayaan dari berbagai pihak yang terlibat dengan perusahaan.

ISO 26000 juga dapat mengurangi biaya operasional dengan sumber daya perusahaan dapat dialokasikan dengan lebih efisien, menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dalam jangka panjang. Tidak hanya itu, ISO 26000 juga membuka peluang untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan dapat membedakan dirinya di pasar dan membangun reputasi yang kuat.

(4) POJK No. 51 Tahun 2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 mengatur terkait pelaksanaan praktik keuangan berkelanjutan bagi entitas seperti lembaga jasa keuangan, perusahaan yang menerbitkan saham, dan perusahaan public. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, berimbang, dan berkelanjutan dengan tujuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara keseluruhan serta menjaga dan mengawasi lingkungan hidup.

Pada Lampiran II POJK No 51/POJK 03/2017 menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan, dengan mencakup informasi sebagai berikut:

- (a) Penjelasan strategi keberlanjutan
- (b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);
- (c) Profil singkat Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan publik
- (d) Penjelasan direksi
- (e) Tata kelola keberlanjutan
- (f) Kinerja keberlanjutan
- (g) Verifikasi tertulis dari pihak independent, jika ada;
- (h) Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan
- (i) Tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

Tujuan dari menerapkan keuangan berkelanjutan adalah untuk menyediakan sumber daya keuangan yang cukup guna mencapai sasaran pembangunan yang terkait dengan perubahan iklim, serta untuk memperkuat ketahanan dan daya saing Lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan public. Hal ini dicapai melalui manajemen risiko lingkungan dan sosial yang lebih baik, serta melalui pemberian kontribusi positif dalam menjaga keseimbangan sistem keuangan, mengurangi ketidaksetaraan sosial, menghindari kerusakan lingkungan, dan mendukung penggunaan energi dan sumber daya alam yang lebih efisien.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Global Report Initiative (GRI)

a. Pengertian *Global Report Initiative* (GRI)

Global Report Initiative adalah sebuah organisasi internasional yang independen untuk mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan. Standar pelaporan dalam *sustainability report* ini akan membantu bisnis maupun organisasi dalam mengkomunikasikan dampak yang ditimbulkan oleh proses bisnis perusahaan.

b. Indikator *Global Report Initiative* (GRI)

Dalam buku pedoman penyusunan laporan keberlanjutan GRI, terdapat petunjuk – petunjuk yang bisa diungkapkan oleh perusahaan dalam pelaporannya. Berikut tabel di bawah ini mencakup indikator – indikator yang terdapat dalam panduan GRI Standar 2016 dan 2019 untuk penyusunan laporan keberlanjutan.

Tabel 2.1
Jumlah item GRI Standard 2016 dan 2021

Kategori	2016	2021
Pengungkapan Umum	56	30
Pendekatan Manajemen	3	3
Ekonomi	17	17
Lingkungan	32	32
Sosial	40	40
Jumlah Item	148	122

Pada tabel 2.1 terlihat perbandingan pedoman GRI Standard tahun 2016 dan GRI Standard tahun 2021. Pada GRI Standard 2016, terdapat 56 indikator pengungkapan umum, 3 indikator pendekatan manajemen, 17 indikator pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kategori ekonomi, 32 indikator pada kategori lingkungan, dan 40 indikator pada kategori sosial. Sedangkan, pada GRI Standard 2021 terdapat 30 indikator pada kategori umum, 3 indikator pada kategori pendekatan manajemen, 17 indikator pada kategori ekonomi, 32 indikator pada kategori lingkungan, dan 40 indikator pada kategori sosial. Perbedaan GRI Standard 2016 dan 2019 terdapat di kategori Umum.

5. Pemangku kepentingan

Berdasarkan teori stakeholder menurut Freeman et al., (2010), *Stakeholder* yang terlibat dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni pemangku kepentingan utama (*primary stakeholders*) dan pemangku kepentingan sekunder (*secondary stakeholders*).

Pihak – pihak yang masuk dalam pemangku kepentingan utama melibatkan pelanggan, karyawan, pemasok, pemegang saham, dan komunitas. Sementara itu, pihak – pihak yang termasuk dalam pemangku kepentingan sekunder mencakup pemerintah, media, pesaing, aliansi konsumen, dan kelompok kepentingan khusus. Berikut adalah beberapa stakeholder yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Media

Dalam era digital yang terus berkembang, peran media sebagai sarana berkomunikasi dengan masyarakat menjadi semakin krusial bagi setiap perusahaan. Menurut Harmoni, (2010) jika perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi melalui inisiatif CSR, perusahaan harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan secara efisien.

Menurut Gössling & Vocht (2007), CSR menjadi sebuah kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingannya, bukan hanya dari segi profit. Media menjadi salah satu alat untuk membantu



komunikasi antara perusahaan dengan para *stakeholder*. Dengan media sebagai sarana komunikasi, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan para *stakeholder*, menciptakan keterbukaan, dan mengukuhkan komitmen terhadap tanggung jawab sosialnya.

Proksi untuk media adalah indikator atau metrik yang digunakan untuk mengukur dampak atau peran media terhadap suatu peristiwa. Berikut adalah beberapa proksi yang digunakan dalam penelitian media sebelumnya:

(2) Jumlah liputan media

Jumlah liputan media mengukur seberapa sering suatu topik muncul dalam liputan media Marculescu & Bogdan, (2007)

(3) Tingkat pemberitaan

Tingkat pemberitaan mengukur sejauh mana media mempengaruhi perhatian publik terhadap suatu isu McCombs & Shaw, (2012)

(4) Reputasi Media

Reputasi media menilai reputasi atau kredibilitas media yang meliput suatu topik atau peristiwa. Ye & Ki, (2012)

b. Kepemilikan Pemerintah

Pemerintah menjadi salah satu bagian dari pemangku kepentingan karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang signifikan terhadap aktivitas dan keberlanjutan suatu perusahaan. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan menetapkan peraturan yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah berpotensi ditekankan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan Huang & Kung, (2010).

Menurut Clarkson (1995), isu – isu penting yang berkaitan dengan kelompok pemangku kepentingan seperti kesehatan dan keselamatan kerja atau kesetaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan diskriminasi dalam pekerjaan merupakan isu – isu yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Isu – Isu tersebut mencerminkan aspek – aspek kritis dalam lingkup tanggung jawab sosial perusahaan dan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran signifikan dalam memastikan perusahaan mematuhi standar dan regulasi terkait. Kesehatan dan keselamatan kerja menjadi fokus penting untuk melindungi kesejahteraan pekerja, sementara kesetaraan dan penghindaran diskriminasi di tempat kerja mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah dalam mengatasi isu – isu ini mencerminkan komitmen untuk memastikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan bisnis.

Proksi yang digunakan kepemilikan pemerintah dapat bervariasi tergantung pada dimensi kepemilikan yang ingin diukur. Berikut adalah beberapa proksi umum untuk kepemilikan pemerintah:

(1) Kepemilikan Saham Pemerintah

Kepemilikan saham pemerintah mengukur jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Porta et al., (1998)

(2) Keterlibatan dalam manajemen

Keterlibatan dalam manajemen menilai apakah pejabat pemerintah menduduki posisi dalam dewan direksi atau manajemen perusahaan. Shleifer & Vishny, (1997)

c. Kepemilikan Institusional

Menurut Siegel & Vitaliano (2007), investor institusional menawarkan layanan kredibilitas yang ditandai oleh asimetri informasi yang signifikan antara investor institusional dan kliennya. Menanam modal dalam perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan menjaga reputasi CSR perusahaan adalah salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



satu cara bagi investor institusional untuk menunjukkan kepada klien potensial

C bahwa mereka dapat diandalkan dan bertanggung jawab, sehingga membedakan layanan mereka.

Menurut Chaganti & Damanpour (1991), kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh bank, dana pension, asosiasi tabungan dan pinjaman, perusahaan asuransi, dan Lembaga pengelola reksadana.

Berikut adalah beberapa contoh dari kepemilikan institusional:

(1) Dana Pensiun

Lembaga dana pensiun adalah organisasi atau badan hukum yang didirikan untuk mengelola dana pension. Lembaga ini termasuk dalam kategori kepemilikan institusional karena mereka mengelola dana pension untuk kepentingan peserta pension. Lembaga ini memiliki portofolio investasi yang melibatkan saham, obligasi, properti, dan instrument keuangan lainnya. Kepemilikan ini memberi mereka kekuatan untuk mengambil keputusan strategis terkait investasi dalam jumlah yang signifikan.

(2) Reksadana

Reksadana adalah suatu bentuk investasi kolektif di mana dana dari sejumlah investor yang terkumpul dikelola bersama dan diinvestasikan dalam berbagai instrument keuangan, seperti saham, obligasi, dan instrument pasar uang lainnya.

(3) Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan asuransi, yang melibatkan pertukaran risiko finansial antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. Dikarenakan perannya, perusahaan asuransi dianggap sebagai kepemilikan institusional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha yang memiliki keterbatasan tanggung jawab pemiliknya. Karakteristik Perseroan Terbatas melibatkan pemisahan antara kepemilikan dan kendali. Hal ini memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi terhadap risiko finansial yang mungkin timbul dari operasional perusahaan.

(5) Yayasan

Yayasan adalah sebuah badan hukum nirlaba yang didirikan dengan tujuan sosial, amal, Pendidikan, keagamaan, atau kemanusiaan. Kegiatan Yayasan seringkali tidak bertujuan untuk mencari keuntungan finansial bagi pemiliknya, namun Yayasan membutuhkan dana untuk mendukung program – programnya. Investasi atau kepemilikan pada entitas bisnis tertentu dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan bagi Yayasan.

(6) Bank

Bank adalah salah satu institusional yang termasuk dalam kepemilikan institusional. Sebagai lembaga keuangan, bank sering kali memiliki pemegang saham, yang bisa terdiri dari individu, entitas atau pemerintah. Kepemilikan saham ini menciptakan hubungan keuangan antara bank dan perusahaan yang sahamnya dimiliki.

(7) Koperasi

Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang atau badan hukum untuk mencapai tujuan ekonomi Bersama. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap usaha koperasi. Sebagai kepemilikan bersama, koperasi dapat dianggap sebagai entitas yang dimiliki oleh komunitas anggotanya.

Proksi untuk mengukur kepemilikan institusional dapat bervariasi tergantung pada dimensi kepemilikan yang ingin diukur. Berikut adalah beberapa proksi untuk kepemilikan institusional:

(1) Persentase saham yang dimiliki oleh institusional

Persentase saham yang dimiliki oleh institusional mengukur persentase total saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusional Stulz, (1988)

(2) Partisipasi dalam rapat pemegang saham

Partisipasi dalam rapat pemegang saham mengukur seberapa aktif institusi terlibat dalam rapat pemegang saham dan pengambilan keputusan. Black & Coffee, (1994)

d. Kepemilikan Manajerial

Menurut Soliman et al., (2014), dikatakan bahwa kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham lainnya. Hal ini terjadi ketika kinerja perusahaan dan pengungkapan kegiatan mengalami penurunan, perusahaan tersebut kemungkinan akan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan, manajer mungkin lebih cenderung mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham, karena kesejahteraan mereka juga terkait dengan kesejahteraan perusahaan. Sebagai contoh, Wulandari & Sudana, (2018) menemukan hubungan positif antara kepemilikan saham manajemen dan pengungkapan CSR. Menurut



Priego de la Cruz et al., (2014), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota dewan direksi dan komisaris.

Proksi untuk mengukur kepemilikan manajerial dapat mencakup berbagai aspek dari dimensi kepemilikan tersebut. Berikut adalah beberapa proksi umum untuk kepemilikan manajerial:

(1) Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen

Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen mengukur persentase total saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh eksekutif dan manajer tingkat tinggi Demsetz & Lehn, (1985)

(2) Keterlibatan manajemen dalam keputusan strategis

Keterlibatan manajemen dalam keputusan strategis menilai sejauh mana manajemen terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan Fama et al., (2011)

e. Diversitas Karyawan

Moore, (1990) menjelaskan bahwa gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara laki – laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya. Meskipun sering kali disamakan dengan jenis kelamin (sex), sebenarnya gender memiliki perbedaan dengan jenis kelamin itu sendiri. Secara etimologis keduanya memiliki arti yang sama, namun secara umum , istilah “sex” digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki – laki dan perempuan berdasarkan anatomi biologis, sedangkan “gender” lebih focus pada aspek sosial, budaya, dan aspek non-biologis lainnya. Marzuki, (2007) menyatakan bahwa gender memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang, dapat menentukan pengalaman hidup yang akan dijalani, dan memiliki dampak pada akses seseorang terhadap Pendidikan, dunia kerja, serta sektor publik lainnya.



Proksi untuk mengukur diversitas karyawan dapat mencakup berbagai

dimensi yang mencerminkan keberagaman dalam organisasi. Berikut adalah beberapa proksi untuk diversitas karyawan:

(1) Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin mengukur rasio antara jumlah karyawan laki – laki dan perempuan dalam organisasi Kochan et al., (2003)

(2) Diversitas Pendidikan dan latar belakang

Diversitas Pendidikan dan latar belakang menilai keberagaman dalam tingkat Pendidikan dan latar belakang Pendidikan karyawan Jackson, (2004)

(3) Diversitas generasi

Diversitas generasi mengukur keberagaman karyawan berdasarkan generasi, seperti generasi milenial, generasi X, dan *baby boomers* Ng & Burke, (2005)

B. Penelitian terdahulu

1. Hitipeuw & Kuntari, (2020) menguji mengenai “Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas, dan Media Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Sebanyak 30 perusahaan property dan Real Estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2016 – 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik dan media secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Qisthi & Fitri, (2021) menguji mengenai “Pengaruh Keterlibatan Pemangku Kepentingan Terhadap Luas pengungkapan laporan keberlanjutan Berdasarkan *Global*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Reporting Initiative (GRI) G4”. Sebanyak 35 Perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia selama 2016 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlibatan pemegang saham memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan keterlibatan karyawan, pemerintah, dan media tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keberlanjutan.

Dharmawan Krisna & Suhardianto, (2016) menguji mengenai “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Social”. Sebanyak 76 data sampel yang digunakan dalam periode 2010 – 2012 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

4. Karina & Yuyetta, (2013) menguji mengenai “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR”. Sebanyak 92 data sampel yang digunakan dalam periode 2011 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham pemerintah dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan, sedangkan kepemilikan saham asing, tipe industry, ukuran perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan.

5. Mujiani & Nurfitri, (2020) menguji mengenai “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Sebanyak 54 data sampel yang digunakan dalam periode 2011 – 2016 pada Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan aktivitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Sustainability Report, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

C. Kerangka pemikiran

1. Pengaruh media terhadap luas pengungkapan laporan keberlanjutan

Media merupakan sarana yang kuat dan efektif untuk menyampaikan informasi, membangun opini, dan membentuk pandangan masyarakat mengenai praktik bisnis dan inisiatif keberlanjutan suatu perusahaan. Berita perusahaan yang mudah dijangkau oleh public dapat menciptakan peningkatan kesadaran dan perhatian terhadap praktik bisnis perusahaan. Ketika berita tersebut memperkuat citra positif atau negatif perusahaan, perusahaan cenderung meresponsnya dengan meningkatkan tingkat transparansi dan pengungkapan informasi keberlanjutan mereka. Penekanan media terhadap isu – isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dapat memotivasi perusahaan untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan keberlanjutan mereka. Kecepatan penyebaran media membuat perusahaan merasa perlu untuk terus meningkatkan luas pengungkapan laporan keberlanjutan. Semakin tinggi tekanan dan perhatian media terhadap isu – isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, semakin tinggi pula respon perusahaan dalam menjawabnya dengan memberikan informasi yang lebih transparan dan komprehensif mengenai praktik bisnis berkelanjutan yang mereka terapkan. Dengan demikian, media menjadi menjadi katalisator yang mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam memenuhi tuntutan dan ekspektasi masyarakat terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Ha Cipta: Dilindungi Undang-Undang

Ha Cipta: Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada penelitian Trijaya (2017), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari media terhadap luas pengungkapan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa perusahaan yang aktif mengungkapkan kegiatan sosial melalui situs webnya dapat memberikan kemudahan bagi para investor untuk memahami program – program yang telah dilakukan oleh perusahaan. Temuan ini juga diperkuat oleh Hitipeuw & Kuntari (2020), yang menunjukkan bahwa media dapat berperan sebagai alat komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat membangun kepercayaan dan mendapatkan legitimasi melalui aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap luas pengungkapan laporan keberlanjutan

Kepemilikan pemerintah menjadi elemen krusial dalam struktur dan dinamika ekonomi suatu negara, membentuk keterkaitan kompleks antara sector swasta dan pemerintah, yang juga berkontribusi pada arah dan kebijakan pembangunan. Dengan keterlibatan dan komitmen pemerintah yang semakin tinggi, perusahaan publik cenderung lebih proaktif dan menyeluruh dalam menyajikan laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Semakin besar kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan, semakin intensif pengawasannya terhadap perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan. Kepemilikan saham pemerintah juga memberikan wewenang untuk memantau dan mengawasi aktivitas perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap norma regulasi, standar etika, dan tanggung jawab sosial yang diterapkan. Terlebih lagi, kepemilikan pemerintah dapat memberikan dorongan kepada perusahaan untuk meningkatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keberlanjutan. Hal ini bertujuan mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada penelitian Karina (2013), dibuktikan bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang mengartikan bahwa pemerintah memiliki perhatian dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, yang tercermin dalam laporan tahunan, khususnya dalam pelaporan aktivitas atau tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mengakibatkan pemerintah menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR sebagai bentuk pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis perusahaan yang memiliki dampak langsung dari kepemilikan saham pemerintah.

3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas luas pengungkapan laporan keberlanjutan

Kepemilikan institusional merupakan landasan kuat yang membentuk pilar keuangan suatu perusahaan, melibatkan partisipasi lembaga – lembaga finansial besar yang memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan strategi korporasi. Lembaga – lembaga ini seringkali memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan kebijakan dan strategi perusahaan, memiliki kepentingan yang kuat dalam menilai kinerja keberlanjutan perusahaan. Dengan adanya kebutuhan pendanaan oleh perusahaan, pelaporan yang baik akan menjadi kunci penting. Pelaporan yang transparan dan akurat mengenai aspek keberlanjutan perusahaan dapat membuka peluang bagi institusi – institusi finansial untuk memberikan bantuan dan pendanaan yang diperlukan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin meningkat pula dorongan bagi perusahaan untuk memperluas luas pengungkapan laporan keberlanjutan, menunjukkan komitmen perusahaan dalam mencapai standar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transparansi yang tinggi dan memenuhi harapan institusional terkait aspek keberlanjutan. Hal ini menciptakan tekanan tambahan untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam aspek keberlanjutan, sekaligus memperkuat keterlibatan institusional dalam mendukung perusahaan menuju praktik bisnis yang berkelanjutan.

Hasil yang dibuktikan oleh Rivandi (2021), bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar nilai kepemilikan saham institusional dalam perusahaan dapat mendorong peningkatan efektivitas manajemen di dalam melaksanakan kegiatan produksi sekaligus mendorong jumlah pengungkapan CSR yang lebih baik. Menurut Parwati & Dewi (2021), dengan peran kepemilikan institusional yang dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat dan optimal terhadap suatu entitas, membuat kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan laporan keberlanjutan.

4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan laporan keberlanjutan

Kepemilikan manajerial merupakan dinamika khusus dalam struktur perusahaan yang melibatkan para eksekutif dan manajer tingkat tinggi memiliki saham dalam perusahaan yang mereka pimpin. Hal ini memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat transparansi dan rinciannya pengungkapan keberlanjutan. Manajer yang memiliki saham signifikan dalam perusahaan cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk memprioritaskan keberlanjutan, karena kesejahteraan finansial mereka berkaitan erat dengan kinerja jangka panjang perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin terfokus dan komprehensif luas pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh pihak manajemen, yang diasumsikan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan lebih mementingkan kepentingan manajer daripada pihak lain di luar perusahaan.

Meningkatnya dividen dan *capital gain* bagi kepemilikan manajerial dapat menjadi pendorong untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan lebih rinci dan lengkap. Pihak manajer memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu prosedur dari bahan yang media perlu untuk membuat citra profil perusahaan yang positif agar dapat menghasilkan laporan keberlanjutan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajer sebagai pemilik saham perusahaan tersebut memiliki insentif yang kuat untuk memaksimalkan nilai saham dan memberikan hasil yang memuaskan kepada para pemegang saham lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Wulandari & Sudana (2018), dimana kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dalam konteks ini, integritas dan komitmen pihak manajer terhadap keberlanjutan dapat menjadi kunci dalam membentuk citra perusahaan yang positif melalui laporan keberlanjutan yang transparan dan bertanggung jawab.

5. Pengaruh diversitas karyawan terhadap luas luas pengungkapan laporan keberlanjutan
Diversity karyawan merupakan landasan penting dalam lingkungan kerja yang memperkaya organisasi melalui kehadiran individu – individu dengan latar belakang, pengalaman, dan karakteristik yang beragam. Adanya keberagaman dalam tim kerja menciptakan peluang untuk memahami dampak sosial dan lingkungan perusahaan dari berbagai perspektif. Selain itu, diversitas karyawan menciptakan lingkungan di mana nilai – nilai keberlanjutan diterapkan secara konsisten, karena beragam pandangan membentuk keputusan dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, melalui peningkatan diversitas karyawan, organisasi dapat memperkaya kualitas luas pengungkapan laporan keberlanjutan, menciptakan pemahaman yang lebih holistic

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

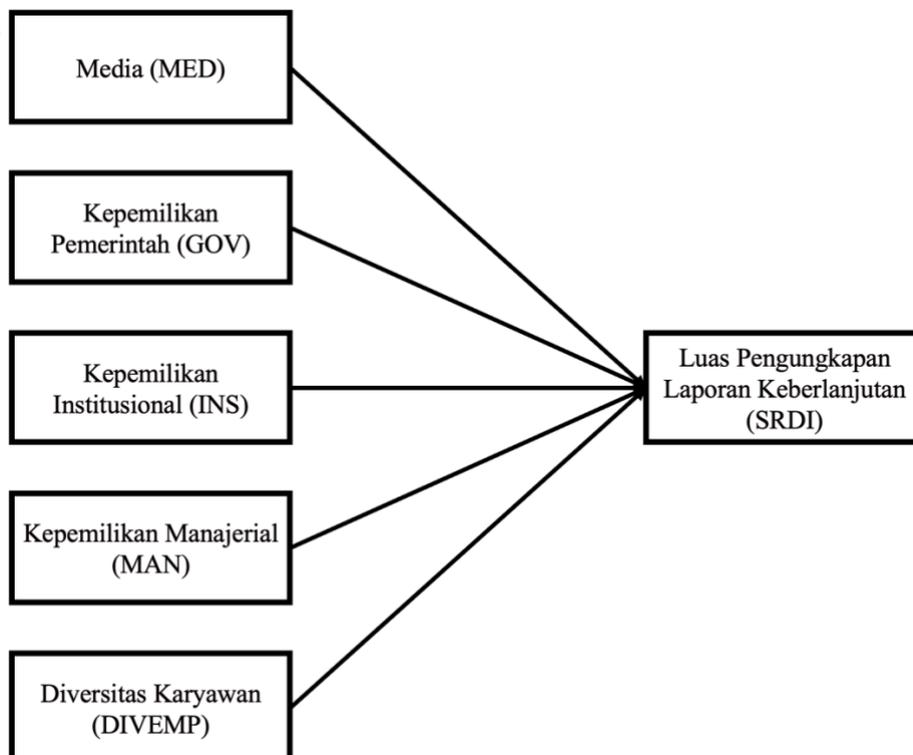


tentang dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Semakin tinggi diversitas karyawan, semakin beragam perspektif yang dapat diakomodasi, meningkatkan integritas dan kesesuaian laporan keberlanjutan dengan realitas sosial dan lingkungan yang beragam pula.

Pada penelitian Wayan & Teg (2016), *gender diversity* berpengaruh positif terhadap kinerja pasar perusahaan, dimana semakin tinggi tingkat keberagaman gender semakin baik kinerja perusahaan. Namun pada penelitian Putri & NR (2023), *gender diversity* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas *sustainability report*. Faktor penyebab tidak berpengaruh adalah minimnya kehadiran wanita dalam perusahaan yang disebabkan ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia.

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

1. **H_{1a}** : Media berpengaruh positif terhadap luas luas pengungkapan laporan keberlanjutan.
2. **H₂** : Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif terhadap luas luas pengungkapan laporan keberlanjutan.
3. **H₃** : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap luas luas pengungkapan laporan keberlanjutan.
4. **H₄** : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap luas luas pengungkapan laporan keberlanjutan.
5. **H₅** : Diversitas karyawan berpengaruh positif terhadap luas luas pengungkapan laporan keberlanjutan.

Hak Cipta: Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta: Dilindungi Undang-Undang
IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.